

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implikasi Fungsionalisasi Jabatan Pengawas Sekolah terhadap Pola Pengembangan Pengawas Sekolah TK, SD, SDLB di Propinsi Jawa Barat – Studi deskriptif analitis tentang pengelolaan pengembangan Pengawas Sekolah TK, SD, SDLB di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan salah satu aspek penting dalam administrasi pendidikan, yakni pengawasan pendidikan yang menjadi salah satu faktor penentu untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan pada tataran sekolah. Kebijakan fungsionalisasi jabatan pengawas sekolah merupakan upaya profesionalisasi pengawas sekolah sebagai aparat pelaksana pengawasan pendidikan. Karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada permasalahan pokok: Bagaimana implikasi kebijakan fungsionalisasi jabatan pengawas sekolah melalui implementasi Keputusan Menpan Nomor 118/1996 terhadap pola pengembangan pengawas sekolah sebagai upaya mewujudkan Pengawas Sekolah TK, SD, SDLB yang profesional di Propinsi Jawa Barat?

Landasan teoritik sebagai upaya pemahaman terhadap masalah yang diteliti berdasarkan konsep keilmuan, meliputi: (1) Fungsi dan Peran Pengawas Sekolah; (2) Manajemen Mutu Terpadu Dalam Praktik Pengawasan Sekolah; serta (3) Tantangan dan Perspektif Pengawasan Pendidikan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis - kualitatif. Untuk dapat memahami masalah yang diteliti dilakukan eksplorasi dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan sumber data secara naturalistik. Instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri (*'human instrument'*) dengan menggunakan teknik dan alat pengumpul data yang diperlukan sesuai dengan sifat data yang dikumpulkan. Tahap penelitian terdiri atas tahap orientasi (*overview*), tahap eksplorasi terfokus (*focused exploration*), dan tahap *'member check'*. Sumber data menggunakan sampel purposif (*'purposive sampling'*), kemudian data yang diperoleh dihimpun dalam catatan lapangan (*fieldnotes*). Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara *'content analysis'*, melalui unitisasi, kategorisasi dan deskripsi data dengan memperhatikan hubungan di antara unit dan kategori data.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pola pengembangan pengawas sekolah TK, SD, SDLB di Propinsi Jawa Barat baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya kebijakan fungsionalisasi jabatan pengawas sekolah, tidak ditetapkan dalam bentuk kebijakan khusus oleh Kepala Kanwil Depdikbud, melainkan dilaksanakan oleh bagian dan bidang terkait sebagai aplikasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam ketentuan yang telah ditetapkan. Perbedaan mendasar dalam pelaksanaan pengembangan

karir pengawas sekolah, adalah diberlakukannya ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan pengawas sekolah dengan menggunakan sistem angka kredit. Sedangkan untuk pengembangan kemampuan profesional dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Dasar dengan aktivitas: (i) pembinaan jalur struktural/kedinasan melalui Kasi Dikdas; (ii) penyelenggaraan diklat melalui pelaksanaan proyek sekolah dasar untuk sistem pembinaan profesional ; dan (iii) optimalisasi wadah pembinaan profesional KKPS baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kotamadya. Khusus untuk diklat yang berkaitan dengan sosialisasi dan implementasi jabatan fungsional pengawas sekolah dilaksanakan oleh proyek yang ada di bidang pendidikan guru dan bagian kepegawaian.

Dengan kondisi faktual pengawas sekolah TK, SD, SDLB di Propinsi Jawa Barat dewasa ini yang secara kuantitatif maupun kualitatif kurang memadai, maka upaya profesionalisasi pengawas sekolah TK, SD, SDLB di Propinsi Jawa Barat masih perlu dikembangkan lebih lanjut secara lebih terkoordinasi dan lebih sinergis antara bagian dan bidang yang bertanggungjawab melaksanakannya, melalui kegiatan pengembangan kemampuan profesional yang inisiatif, kreatif, dan inovatif, agar tingkat ketergantungan pelaksanaan pengembangan pada diklat yang diselenggarakan proyek secara bertahap dapat dikurangi.

Hasil analisis posisi mengenai tahap implementasi kebijakan jabatan fungsional pengawas sekolah mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor dominan yang menjadi kekuatan untuk dimanfaatkan sebagai peluang dalam mewujudkan standardisasi SDM pengawas sekolah TK, SD, SDLB sesuai ketentuan jabatan fungsional pengawas sekolah dalam perspektif dan konteks desentralisasi pengelolaan pendidikan, yakni sebagai *'Quality auditor and teaching controller'*. Sedangkan, faktor dominan yang menjadi kelemahan dan menjadi tantangan untuk keberhasilan pelaksanaannya, disebabkan karena kondisi faktual pengawas sekolah baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta belum diterapkannya sosialisasi mengenai ketentuan tersebut. Disamping itu, penyebab lainnya karena tidak adanya stimulan berupa kesejahteraan yang seimbang, sehingga belum diberlakukannya ketentuan tunjangan jabatan yang proporsional.

Selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Perlunya dirumuskan kebijakan pengembangan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Depdikbud (Depdiknas) pada tataran propinsi yang disusun bersama-sama oleh bagian dan bidang terkait, mengacu pada ketentuan jabatan fungsional pengawas sekolah, dan dapat diberlakukan pada masa transisi menjelang pelaksanaan otonomi daerah; (2) Perlunya penyusunan program pengembangan yang aktual dengan memperhatikan prinsip dan langkah-langkah yang ditetapkan secara konseptual untuk pengembangan personal dalam konteks manajemen sumber daya manusia; (3) Perlunya perumusan model pengembangan kemampuan profesional pengawas sekolah TK, SD, SDLB yang bertumpu pada tataran kabupaten/kotamadya dengan fokus utama pada pemberdayaan pengawas sekolah baik secara individual maupun kelompok, serta rancangan model evaluasi dan tindak lanjutnya sebagai upaya perbaikan program yang terus menerus (*'quality control circle'*).

## ABSTRACT

"The implications of the implementation of 'Keputusan Menpan No.118/1996' towards the pattern of the development of Primary Educations' Superintendents in West Java Province" (2000: Evi Syaefini Shaleha).

Through this study, the writer investigated one of the educational administration problems, that is educational control. It is one of important things in the management of education, and the superintendents are in a very strategic position in building efficiency of educational management, especially in management of schools.

The central theme of the problem is as follows: In the implementation of *Kep. Menpan No. 118/1996* as an educational policy, there should be some implications therein. The training and development as one of the functions of personnel and human resources management (PHRM) is the most important thing in the efforts of functionalization of the superintendents. So the focus of this study is on the implications of the implementation of the policy towards the development, especially the training and development of primary school's superintendents done by the officials of *Kanwil Depdikbud* in West Java. A key subject of the efforts that must be noticed is the real and latest condition of superintendents as a subject of the development, that is all of the backgrounds of them (educational, latest duty and places where they work).

This study used naturalistic inquiry. The researcher collected data through interview, observation, and document for which she was the key instrument. To administer the data collected, she employed 'fieldnotes'. And to analyze them she used the constant comparative method with content analysis.

The study indicates that the existing development programs has not been developed in the right way, according to the concept of "Human Resources and Development' management. There are no much difference in functionalization of superintendents between before and after the implementation of the policy (*Kep. Menpan No. 118/1996*). The real condition of superintendents in primary schools in West Java nowadays, both quantitatively and qualitatively, is not satisfactory. Most superintendents should enhance their education, and many of them do not have the capability of doing their task, especially in instructional supervisory because of their latest duty. Whereas, the performance standard of superintendents in *Kep. Menpan No.118/1996* assumes as a sufficient standard for them to do their job as the 'quality auditor and teaching controller' in the context of the decentralization in educational management policy.

The outcome of this study gives some recommendations:(1) As the main responsibility in developing the superintendents is the officials in *Kandep Dikbud kabupaten/ Kotamadya*, the programs developed by the officials in *Kanwil Depdikbud* can be used as a reference for them. The programs should be put

into effect in the transitional period before the decentralization policy is put fully into effect in year of 2001; (2) The officials of *Kanwil Depdikbud* in West Java who also have a responsibility in developing the program of functionalization superintendents nowadays, must rearrange the programs in a synergic way among all sections who have the same responsibility. In developing the programs, firstly they should do preliminary steps in training and development as Werther and Davis say (1996). The step can be done through some activities. They should evaluate the programs done before, analyze the superintendents performance standard in Kep. Menpan No.118/1996, and consider the conditions of the superintendents which includes both quantitative and qualitative way. All aspects mentioned above will determine the success of the training and development; and (3) They also should develop the evaluation and follow up programs, based on the criteria of the success of the developing programs.

